

KOLOM Si KLERK**BLT (Bantuan Langsung Tunai)**

Sesuai dengan rencana, dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 100.000,- (seratus ribu) per bulan jadi digelontorkan kepada rakyat miskin. BLT yang diberikan langsung untuk tiga bulan atau, rakyat miskin mendapatkan Rp 300.000,- secara langsung yang dapat diambil di setiap Kantor Pos yang ditunjuk.

Perjuangan untuk mendapatkan uang sebesar itu setiap triwulan ternyata memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Banyak nenek/kakek yang pingsan gara-gara menunggu antrian yang sangat panjang di tengah terik matahari. Sementara itu perjuangan untuk menjadi "orang miskin" dan "berpura-pura miskin" juga dilakukan oleh orang-orang yang kemarin mendapatkan BLT.

Sementara itu di lapangan, para petugas pendata ternyata melakukan manipulasi data. Hasilnya yang mendapatkan jatah BLT itu ternyata bukan yang benar-benar berhak. Mereka mendaftarkan saudara-saudaranya untuk mendapatkan jatah 300 ribu perak tersebut. Atau meminta bagian dari 300 ribu itu untuk kepentingan mereka. Jadilah keributan, karena mereka yang benar-benar harus menerima ternyata tidak kebagian dan menjadikan beberapa Kepala Desa dan petugas pendata menyatakan mundur karena diteror masyarakat.

Pola pembagian ala Sinterklas inipun tak pelak lagi menjadi bahan perbincangan para ahli ekonomi, sosial dan keagamaan. Sebagian menyatakan bahwa pemberian ini tidak akan mendidik para warga miskin, malah menjadikan mereka bermental pengemis. Sehingga dengan demikian mereka perlu diberi kail bukan ikan. Kail atau pekerjaan ternyata sulit didapat di negeri ini, apalagi untuk kakek/nenek-nenek renta, mana ada. Padahal sesuai dengan UUD 1945, bahwa rakyat miskin menjadi urusan negara, dan negara wajib menyantuni/mengurus mereka.

Setelah pembagian pertama BLT ini, banyak petinggi daerah yang mencak-mencak karena data orang miskin di daerahnya menjadi demikian banyak. Sepertinya kejadian ini terulang pada saat program IDT berlangsung. Begitu banyak daerah yang menyatakan sebagai daerah tertinggal dan perlu diberi santunan.

Ada hikmah yang patut disyukuri bahwa tahun 2005 pasca kenaikan BBM, walaupun inflasi naik, wajar dikdas populer kembali. Turunnya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) telah memberikan nafas baru bagi para orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya hingga SMP. Anak-anak di usia sekolah tersebut dapat meneruskan cita-cita luhurnya minimal hingga SMP dengan gratis. Walaupun demikian beberapa sekolah yang dana operasional sekolahnya lebih tinggi dari BOS murid-muridnya tetap diharuskan membayar kekurangannya, tetapi anak yang tidak mampu tetap digratiskan.

Kebijakan Presiden SBY ini memang disambut dengan berbagai reaksi dari masyarakat, cendekiawan maupun para lawan politiknya. Hal yang biasa terjadi, karena setiap kebijakan yang diterapkan memang selalu mengundang pro dan kontra. Keputusan telah diambil, program BLT dan BOS akan terus dijalankan sebagai konsekuensi naiknya BBM yang subsidiinya dialihkan untuk dua program dimaksud.

Langkah berikut yang akan dilakukan SBY adalah menaikkan gaji PNS pada awal bulan Januari tahun depan. Malah ada pernyataan yang beliau kemukakan tentang keinginannya untuk memberikan gaji PNS minimal 1 juta rupiah untuk golongan paling rendah. Hal ini dilakukan untuk mejnjadikan PNS lebih sejahtera sehingga tidak perlu KKN lagi. Sementara itu beliau tidak menaikkan gaji Presiden, Wapres dan para Menteri Kabinetnya. Langkah yang patut dipuji. Kebijakan telah digulirkan, kita tunggu hasil evaluasinya tahun depan. (Dayat Hidayat).